



KECAMATAN
SAMBUNGMACAN



2025

RENJA RENCANA KERJA

DISUSUN TAHUN 2024

KECAMATAN SAMBUNGMACAN

Jl. Raya Timur Km 11 Sambungmacan - 57253

email : kecsambungmacan@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Alloh Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sambungmacan Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja Kecamatan Sambungmacan 2025 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah harus melaksanakan Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Sambungmacan tahun 2025.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sambungmacan Tahun 2025 ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Sambungmacan pada tahun 2025.

Sragen, 18 April 2024

CAMAT SAMBUNGMACAN

BUDI SANTOSO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19810301 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK.....	v
LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	9
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	48
BAB V PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	11
Tabel 2.2	22
Tabel 2.3	33
Tabel 2.5	41
Tabel 4.1	48

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Kecamatan Sambungmacan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sragen yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayahnya sesuai Peraturan Bupati Sragen No. 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.

Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

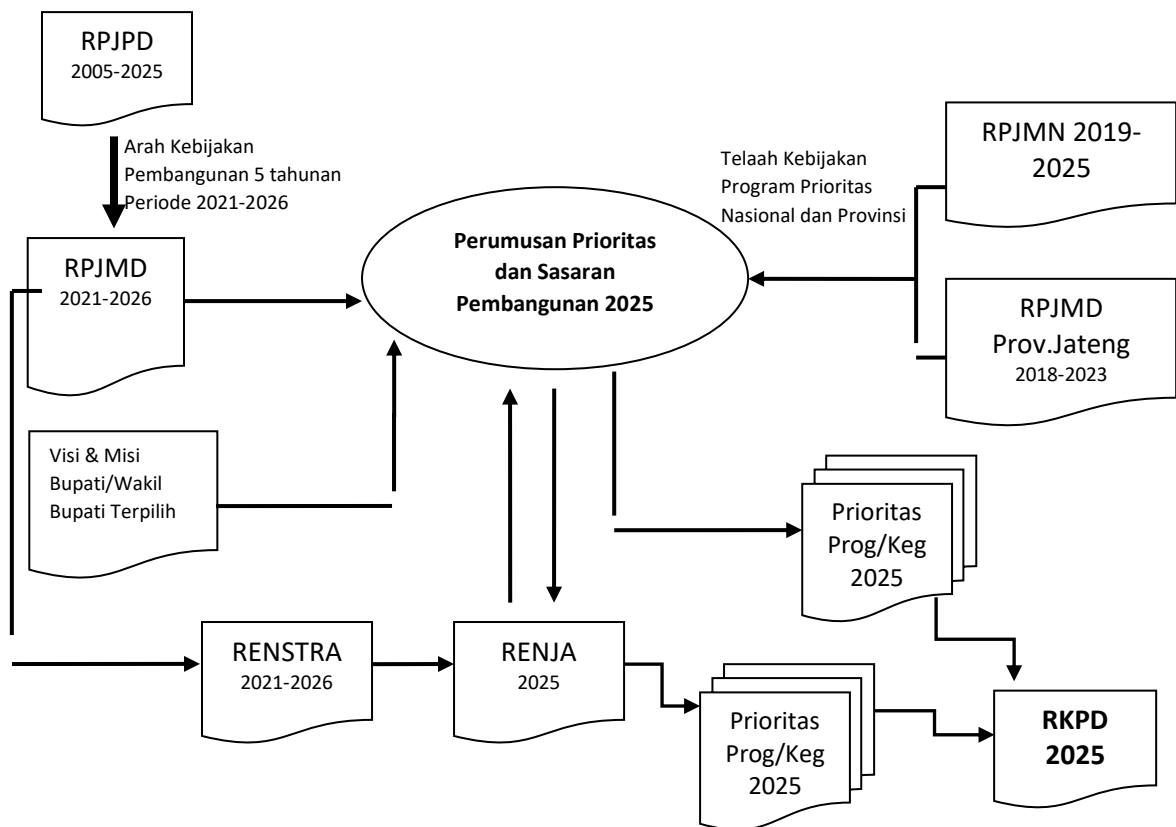
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bagian ketujuh pasal 125 sampai dengan pasal 143 dan penjelasan teknis penyusunan pada Lampiran bagian C. Tata Cara Penyajian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Dan Dokumen Rencana Perangkat Daerah sub bagian C.5.

Penyajian Dokumen Renja. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun setiap tahun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Rancangan renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar 1.1. Alur Perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renja
 - a) Pembentukan Tim Penyusun Renja
 - b) Orientasi mengenai Renja
 - c) Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
 - d) Pengumpulan Data dan Informasi
2. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan Tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

3. Tahap Perumusan Rancangan Renja

- a) Pengolahan data dan informasi;
- b) Analisis gambaran pelayanan OPD;
- c) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
- d) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- e) Telaah terhadap rancangan awal RKPD
- f) Perumusan tujuan dan sasaran;
- g) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- h) Perumusan kegiatan prioritas;
- i) Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
- j) Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
- k) Pembahasan forum OPD; dan
- l) Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

4. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja

5. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD

6. Penetapan Renja.

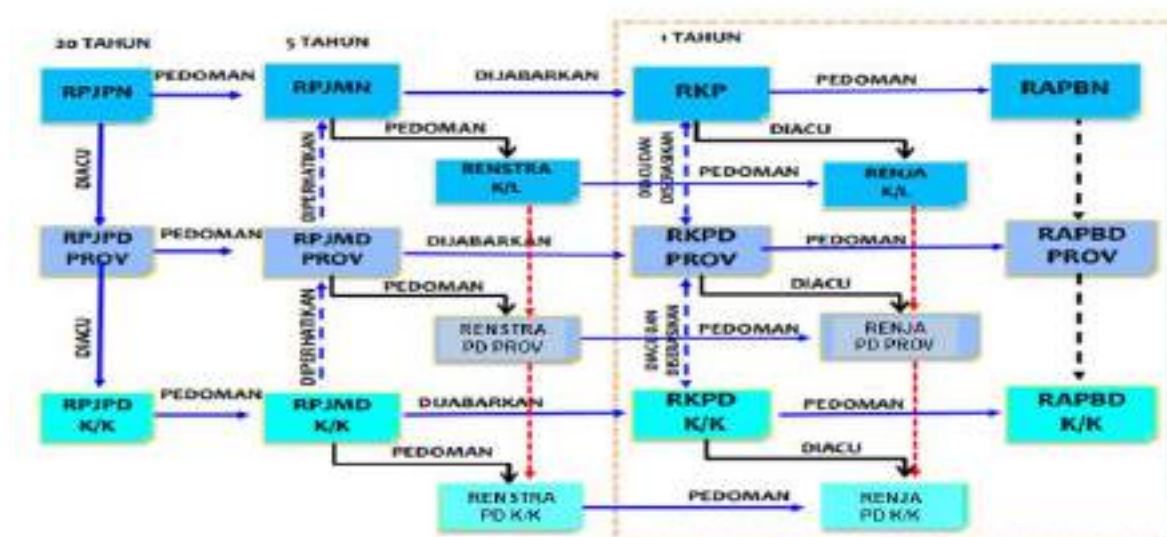
RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berwawasan 5 (Lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021 – 2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan

tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah.

RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten. Selanjutnya Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Kecamatan Sambungmacan Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Sambungmacan Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan yang saling terkait. Oleh karena itu, target capaian sasaran dan indikator yang dicapai dalam dokumen Renja Kecamatan Sambungmacan harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan indikator yang terdapat dalam RKPD. Lebih lanjut, target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang tertuang dalam dokumen RKPD juga menjadi pedoman dan dituangkan ke dalam daftar prioritas program dan kegiatan tahun 2025.



Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 21. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;
 22. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana kerja Kecamatan Sambungmacan Tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk menjabarkan program pembangunan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Kecamatan Sambungmacan 2021-2026. Dokumen ini selanjutnya akan

menggambarkan rencana kegiatan berikut sasaran, lokasi dan besaran anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Adapun Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Sambungmacan Tahun 2025 adalah:

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Mewujudkan program prioritas pembangunan Kecamatan Sambungmacan tahun 2025 yang lebih terukur dan lebih optimal;
3. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.

3.1. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Sambungmacan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari rencana strategis Kecamatan Sambungmacan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP). LKjIP adalah sebuah dokumen akuntabilitas sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Terkait dengan hal tersebut, dalam dokumen ini disajikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dan tahun berjalan 2024. Sejalan dengan berakhirnya tahun anggaran 2023, Renja Kecamatan Sambungmacan tahun 2023 telah dilaksanakan. Berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun anggaran 2023 perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mengetahui hasil yang telah dicapai. Capaian kinerja Renja Kecamatan Sambungmacan Tahun 2023 telah tercapai 100%, berbagai factor pendukung diataranya adalah kerja sama dan kolaborasi antar ASN Kecamatan Sambungmacan maupun instansi terkait termasuk Pemerintah Desa, sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Sambungmacan berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Sambungmacan pada umumnya.

Sedangkan di Perubahan

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berupa kegiatan Jalan Sehat dan Senam bersama dalam rangka memperingati Hari Pahlawan dengan peserta sebanyak 1.000 org.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Nama SKPD: Kecamatan Sambungmacan

KODE	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah, program dan kegiatan	Indikator kinerja program (Out come)/ kegiatan (Out put)	Target kinerja capaian program (renstra perangkat daerah) Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu(n-4)			Target program dan kegiatan Renja perangkat daerah tahun n-1 (2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target renja perangkat daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi renja perangkat daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Prosentase Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 laporan	100%
7.01.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.02.03	<i>Peningkatan Efektifitas pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	12 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	100%
7.01.02.2.04	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>Prosentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		0 kepada camat								
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 laporan	100%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAAAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	-	100%	-	-	-	-	-	-
<i>7.01.03.2.01</i>	<i>Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa</i>	<i>Prosentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa</i>	-	100%	-	-	-	-	-	-
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	12 laporan	-	-	-	-	-	-
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan laporan kejadian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<i>7.01.04.2.01</i>	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan</i>	<i>Prosentase Cakupan Penyelenggaraa</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	<i>Ketertiban Umum</i>	<i>n ketentraman dan ketertiban umum</i>								
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 laporan	100%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<i>7.01.05.2.01</i>	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.05.2.01.01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan	Jumlah orang Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam	100 orang	-	1000 orang	1000 orang	100%	-	-	-

	Pancasila, Pelaksanaan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	200 org	2.690 org	2.690 org	100%	400 org	1200 org	100%
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan	140 org	100 org	140 org	140 org	100%	140 org	420 org	100%

		Kesatuan Bangsa								
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	70 org	70 org	70 org	70 org	100%	70 org	210 org	100%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100%	9 dokumen	27 dokumen	100%
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100%	9 dokumen	27 dokumen	100%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Urusan Pemerintahan Daerah yang Tercukupi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Prosentase Administrasi Keuangan Tercukupi</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	18 Org	17 Org	17 Org	17 Org	100%	18 Org	54 Org	100%
7.01.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Prosentase Administrasi Umum Tercukupi</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.01.01.2.08.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	12 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	12 paket	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	12 paket	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	36 paket	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	36 paket	100%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	-	-	-
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	100%

7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	-	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	-	-	-
7.01.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Prosentase tersediaanya peralatan perkantoran</i>	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	-	-	102 unit	102 unit	100%	-	-	-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya	2 unit	-	1 unit	1 unit	100%	2 unit	6 unit	100%
7.0101.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Prosentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.0101.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	100%
7.0101.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	100%
7.0101.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum	12 laporan	12 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	12 laporan	100%

	Kantor	kantor yang disediakan								
7.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Prosentase Pemeliharaan Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak	12 unit	9 unit	12 unit	12 unit	100%	12 unit	36 unit	100%
	Pemeliharaan mebel	Jumlah unit mebel yang terpelihara	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	100%	-	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	3 unit	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama mengandung tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen nomor 85 Tahun 2021, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan adalah sebagai berikut:

No	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik di Kecamatan	1.Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam memberikan pelayanan publik masyarakat di tingkat kecamatan - Formulasi Pengukuran: Survey kepuasan masyarakat - Tipe Perhitungan: Non Kumulatif
2.	Meningkatnya kinerja kecamatan	1.Predikat LKjIP	- Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan - Formulasi Pengukuran : Hasil Review LKjIP oleh Inspektorat - Tipe Perhitungan : Non Kumulatif.

Berdasarkan IKU tersebut di atas, maka dianalisis kinerja pelayanan Kecamatan Sambungmacan yang dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Sambungmacan

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			17 orang	17 orang	17 orang	17 orang	16 orang	15 orang	17 orang	17 orang	
	Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	\ "Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan\ "			12 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	\ "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan\ "			12 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	
	\ "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan\ "			12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	
	\ "Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan\ "			12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	
	Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	
	Cakupan pengadaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah unit Mebel yang Disediakan			103 unit	0 unit	0 unit	2 unit	103 unit	0 unit	0 unit	2 unit	
	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang Disediakan			1 unit	2 unit	2 unit	2 unit	1 unit	2 unit	2 unit	2 unit	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	
	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 laporan	12 lapora	12 lapora	12 lapora	12 lapora	12 lapora	12 lapora	12 lapora	
	\ "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan\ "			12 lapora	12 lapora	12 lapora	12 lapora	12 lapora	12 lapora	12 lapora	12 lapora	
	\ "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan\ "			4 lapora	4 lapora	4 lapora	4 lapora	4 lapora	4 lapora	4 lapora	4 lapora	
	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	
	\ "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi\ "			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	
	Jumlah unit mebel yang terpelihara			12 unit	0 unit	0 unit	12 unit	12 unit	0 unit	0 unit	12 unit	
	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
	Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	yang ada di Kecamatan											
	\ "Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan\ "			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	
	Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	\ "Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang Dilimpahkan\ "			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
	Prosentase Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan prosentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	\ "Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan\ "			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	
	Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Prosentase Cakupan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah orang Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pelestarian			1000 orang	0 orang	100 orang	100 orang	1000 orang	0 orang	100 orang	100 orang	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Koordinasi dan pembinaan (Bintek,Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			2.690 org	400 org	0 org	0 org	2.690 org	400 org	0 org	0 org	
	\ "Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa\ "			140 org	140 org	140 org	140 org	140 org	140 org	140 org	140 org	
	\ "Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional\ "			70 org	70 org	70 org	70 org	70 org	70 org	70 org	70 org	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Prosentase Desa yang memperoleh fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	
	\ "Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya\ "			9 laporan	9 laporan	9 laporan	9 laporan	9 laporan	9 laporan	9 laporan	9 laporan	

2.3 . Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 sebagaimana termuat dalam dokumen RKPD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1. Kualitas tata kelola pemerintahan;
- 2. Kualitas sumber daya manusia;
- 3. Pertumbuhan ekonomi;
- 4. Kemiskinan dan pengangguran;
- 5. Kualitas infrastruktur wilayah;
- 6. Kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen nomor 64 Tahun 2021 pasal 89 disebutkan bahwa Kecamatan bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan. Secara lebih khusus, sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, Kecamatan menyelenggarakan pelayanan unsur kewilayahan. Berkenaan dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana dimaksud, isu strategis pembangunan daerah yang dapat didukung secara langsung oleh Kecamatan adalah berfokus pada permasalahan **kualitas tata kelola pemerintahan**.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kecamatan Sambungmacan, perlu perhatian yang serius dan fokus dalam pencapaian kinerja yang dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan;
- b. Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Kecamatan.

Memperhatikan tugas fungsi Kecamatan dan kedua indikator kinerja tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan Kecamatan Sambungmacan yang ditampilkan dalam tabel berikut:

Masalah Utama Kecamatan	Faktor yang Mempengaruhi
Masih kurang optimalnya nilai IKM di Kecamatan	Kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat
	Kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat (lembaga) Desa
	Masih terjadi tindak kriminalitas maupun kejadian yang mengganggu ketertiban umum

	kurangnya wawasan kebangsaan masyarakat
	Kinerja pemerintah Desa yang belum optimal
Masih rendahnya tingkat akuntabilitas di Kecamatan	Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi perkantoran

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan utama Kecamatan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat tantangan dan peluang yang saat ini dihadapi oleh Kecamatan Sambungmacan sebagai berikut:

a. Faktor Tantangan (*Threat*)

- 1) Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima;
- 2) Koordinasi antar instansi dan Pemerintah Desa yang belum maksimal;
- 3) Era keterbukaan informasi menuntut budaya transparansi dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- 4) Semakin terbukanya informasi di era teknologi informasi menuntut sikap aparatur birokrasi untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- 1) Komitmen Bupati untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- 2) Hubungan dengan *stakeholder* cukup baik;
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat;
- 4) Terbukanya kesempatan secara luas bagi ASN untuk mengembangkan diri melalui sekolah formal maupun bintek teknis.

Berkenaan dengan permasalahan, tantangan dan peluang yang sudah diuraikan di atas, ada beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan prioritas tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Untuk Perlu meningkatkan akuntabilitas Kecamatan perlu adanya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja yang lebih baik diluar kegiatan rutin yang sudah dilaksanakan;
- b. Untuk meningkatkan nilai IKM Kecamatan, Perlu adanya kegiatan peningkatan efektivitas pelayanan Kecamatan, diantaranya berupa forum konsultasi publik.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sragen tahun 2025 yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja Kecamatan Sambungmacan tahun 2025 secara umum telah sesuai untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sambungmacan tahun 2025. Hal ini didasarkan pada penyandingan program dan kegiatan yang tercantum dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 dengan dokumen rencana startegis Kecamatan Sambungmacan tahun 2021- 2026.

Penyandingan ini dilakukan dalam rangka memastikan program dan kegiatan yang akan dijalankan setiap tahun selaras dengan yang telah direncanakan dalam renstra Kecamatan tahun 2021-2026. Sesuai peraturan, semua dokumen perencanaan OPD berupa renstra, renja dan RKA harus selaras dan saling mendukung.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sb. macan	Persentase administrasi keuangan yang tercukupi	100		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sb. macan	Persentase administrasi keuangan yang tercukupi	100		
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Kecamatan Sb. macan	<i>Persentase administrasi keuangan yang tercukupi</i>	100	2,056,758	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Kecamatan Sb. macan	<i>Persentase administrasi keuangan yang tercukupi</i>	100	2,056,758	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sb. macan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang	2,056,758	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sb. macan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang	2,056,758	
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Kecamatan Sb. macan	<i>Prosentase administrasi umum yang tercukupi</i>	100	147.727	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Kecamatan Sb. macan	<i>Prosentase administrasi umum yang tercukupi</i>	100	147.727	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sb. macan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	2,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sb. macan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	2,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sb. macan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 pakert	14.456	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sb. macan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 pakert	14.456	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamat an Sb. macam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	16,350	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamat an Sb. macam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	16,350	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamat an Sb. macam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	2.975	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamat an Sb. macam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	2.975	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamat an Sb. macam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamat an Sb. macam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamat an Sb. macam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	13.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamat an Sb. macam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	13.000	
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Kecama tan Sb. macam	<i>Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>100</i>	<i>5,000</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Kecama tan Sb. macam	<i>Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>100</i>	<i>5,000</i>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamat an Sb. macam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	5,000	Pengadaan Mebel	Kecamat an Sb. macam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	5,000	
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Kecama tan Sb. macam	<i>Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan</i>	<i>100</i>	<i>40.230</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Kecama tan Sb. macam	<i>Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	<i>100</i>	<i>40.230</i>	

			Pemerintahan Daerah					Daerah			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sb. macan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	26,505	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sb. macan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	26,505	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sb. macan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	7,500	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sb. macan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	7,500	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sb. macan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	6.225	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sb. macan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	6.225	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sb. macan	Prosentase pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	53.716	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sb. macan	Prosentase pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	53.716	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sb. macan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	44,200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sb. macan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	44,200	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sb. macan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 unit	9.516	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sb. macan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 unit	9.516	

			Dipelihara/Direhabilitasi					Dipelihara/Direhabilitasi			
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sb. macan	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	100	163.337	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sb. macan	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	100	163.337	
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Kecamatan Sb. macan	<i>Persentase Jumlah kegiatan koordinasi</i>	<i>100</i>	<i>6,000</i>	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Kecamatan Sb. macan	<i>Persentase Jumlah kegiatan koordinasi</i>	<i>100</i>	<i>6,000</i>	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Sb. macan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	6,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Sb. macan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	6,000	
	<i>Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	Kecamatan Sb. macan	<i>Persentase Jumlah kegiatan koordinasi</i>	<i>100</i>	<i>12.510</i>	<i>Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	Kecamatan Sb. macan	<i>Persentase Jumlah kegiatan koordinasi</i>	<i>100</i>	<i>12.510</i>	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sb. macan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12.510	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sb. macan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12.510	

	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	Kecamatan Sb. macan	<i>Persentase Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</i>	100	144,827	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	Kecamatan Sb. macan	<i>Persentase Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</i>	100	144,827	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Sb. macan	Jumlah Laporan pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	144,827	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Sb. macan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	144,827	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Sb. macan	Persentase penanganan laporan kejadian	100	26,738	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Sb. macan	Persentase penanganan laporan kejadian	100	26,738	
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	Kecamatan Sb. macan	<i>persentase cakupan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</i>	100	26,738	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	Kecamatan Sb. macan	<i>persentase cakupan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</i>	100	26,738	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sb. macan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	26,738	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sb. macan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	26,738	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sb. macan	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	100 %	215.565	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sb. macan	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	100 %	215.565	
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai</i>	Kecamatan Sb. macan	<i>Persentase pelaksanaan kegiatan</i>	100	215.565	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai</i>	Kecamatan Sb. macan	<i>Persentase pelaksanaan kegiatan</i>	100	215.565	

<i>Penugasan Kepala Daerah</i>		<i>penugasan kepala daerah</i>			<i>Penugasan Kepala Daerah</i>		<i>penugasan kepala daerah</i>			
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Republik Indonesia	Kecamatan Sb. macan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Republik Indonesia	100 orang	200.000	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Republik Indonesia	Kecamatan Sb. macan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Republik Indonesia	100 orang	200.000	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Sb. macan	Jumlah Orang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	-	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Sb. macan	Jumlah Orang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	-	
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Sb. macan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	140 orang	9.838	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Sb. macan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	140 orang	9.838	

	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Sb. macan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	70	5.727	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Sb. macan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	70	5.727	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Sb. macan	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB- Desa tepat waktu	100	22,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Sb. macan	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB- Desa tepat waktu	100	22,000	
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Kecamatan Sb. macan	<i>Persentase jumlah desa yang dibina</i>	100	15.000	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Kecamatan Sb. macan	<i>Persentase jumlah desa yang dibina</i>	100	15.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Sb. macan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	9 dokumen	15.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Sb. macan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	9 dokumen	15.000	

	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecama tan Sb. macan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9 laporan	7,000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecama tan Sb. macan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9 laporan	7,000	
	JUMLAH TOTAL				2.632.126					2.632.126	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Renja Kecamatan Sambungmacan didiskusikan dalam pembahasan SKPD tingkat Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat telah diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sambungmacan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kajian kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan jumlah anggaran, serta tantangan yang dihadapi dan peluang yang dapat dioptimalkan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat telah selaras dengan kebutuhan sebagaimana telah direncanakan oleh Kecamatan Sambungmacan, sehingga kondisi sinergis ini dapat dengan lancar dituangkan dalam dokumen perencanaan dan diharapkan dapat berhasil dalam pelaksanaannya.

Penelaahan atau Kajian/proses usulan program/kegiatan masyarakat pada Kecamatan Sambungmacan yang tertuang pada Musrenbang Kecamatan Tahun 2024 memprioritaskan pada pembangunan di bidang pemerintahan, infrastuktur, kesejahteraan rakyat dan ekonomi.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Sambungmacan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 terdiri dari pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan.

Dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan nasional yang diprioritaskan di tahun 2025 tersebut salah satunya adalah penurunan prevalensi stunting yang didukung kegiatan yang ada di Kecamatan Sambungmacan, dengan program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sragen 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025, tema pembangunan daerah tahun 2025 adalah **"Akselerasi dan Pemantapan Peningkatan Kualitas Infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup"**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pemantapan kualitas infrastruktur berwawasan lingkungan hidup
2. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran
3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi,
4. Peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat;
5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan, prioritas pembangunan daerah yang dapat didukung pencapaiannya oleh Kecamatan adalah prioritas ke- 5, yaitu: **Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah.** Berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Sambungmacan 2021-2026, tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Sambungmacan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik di Kecamatan
2. Meningkatnya kinerja kecamatan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu, yang difokuskan kepada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi. Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat

diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Kecamatan Sambungmacan adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik di Kecamatan
- 2. Meningkatnya kinerja kecamatan

Adapun indikator ketercapaian sasaran yang menjadi keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut :

- 1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
Nilai IKM diperoleh berdasarkan survei kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan.
- 2. Predikat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Nilai LKjIP diperoleh dari hasil review dari Tim Penilai SAKIP dengan kategori penilaian sebagai berikut:

Nilai	AA	untuk nilai	90-100
Nilai	A	untuk nilai	80-90
Nilai	BB	untuk nilai	70-80
Nilai	B	untuk nilai	60-70
Nilai	CC	untuk nilai	50-60
Nilai	C	untuk nilai	30-50
Nilai	D	untuk nilai	0-30

Selanjutnya, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sambungmacan tahun 2025 secara lebih terstruktur dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sambungmacan Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan		Nilai IKM Kecamatan	83,88
		Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	83,88
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan		Predikat kinerja LKjIP Kecamatan	64 (B)

		Meningkatnya kinerja kecamatan	Predikat kinerja LKJIP Kecamatan	64 (B)
--	--	--------------------------------	----------------------------------	--------

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Sambungmacan Tahun 2025 adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sragen tahun 2021 – 2026, yang telah dirumuskan dalam tema pembangunan daerah didalam RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025, yaitu **Akselerasi dan Pemantapan Peningkatan Kualitas Infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup**”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pemantapan kualitas infrastruktur berwawasan lingkungan hidup
2. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran
3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi,
4. Peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat;
5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah.

Selanjutnya prioritas pembangunan tersebut dirumuskan dalam Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2025, yang dijabarkan dalam 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 17 (delapan belas) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 6 (enam) Urusan Pilihan, 2 (dua) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, 4 (empat) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, 1 (satu) Unsur Pengawas, 1 (satu) Unsur Kewilayahan dan 1 (satu) Unsur Pemerintahan Umum.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan, untuk mendukung prioritas pembangunan daerah ke- 5, yaitu: **Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah**, Kecamatan Sambungmacan masuk kategori Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dan Unsur Kewilayahan, yang mencakup 7 (Tujuh) program 13 (tiga belas) kegiatan dan 21 (Dua Puluh satu) sub kegiatan sesuai dengan Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut:

Prioritas Pembangunan Daerah	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.056.758.232,00

7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.056.758.232,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	147.727.000,00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.456.000,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.350.000,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.975.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000,00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.230.000,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.505.000,00
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.225.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.716.948,00
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.200.000,00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.516.948,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	163.337.000,00

7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.000.000,00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6.000.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12.510.000,00
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.510.000,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	144.827.000,00
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	144.827.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26.738.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	26.738.000,00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	26.738.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	215.565.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	215.565.000,00
7	01	05	2.01	01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Republik Indonesia	200.000.000,00
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-

7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	9.838.000,00
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5.727.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	22.000.000,00
7	01	06	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	22.000.000,00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.000.000,00
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.000.000,00
					TOTAL	2.632.126.180,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dari uraian permasalahan yang sudah disebutkan di bab II di atas, masalah utama kecamatan yaitu :

1. Masih kurang optimalnya nilai IKM di Kecamatan, dipengaruhi oleh faktor – faktor sebagai berikut:
 - a. Kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat, maka disusun rencana kerja dan pendanaan dengan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
 - b. Masih terjadi tindak kriminalitas maupun kejadian yang mengganggu ketertiban umum maka disusun rencana kerja dan pendanaan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
 - c. Kurangnya wawasan kebangsaan masyarakat maka disusun rencana kerja dan pendanaan program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
 - d. Kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat (lembaga) Desa dan Kelurahan maka disusun rencana kerja dan pendanaan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
 - e. Kinerja pemerintah Desa yang belum optimal maka disusun rencana kerja dan pendanaan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
2. Masih rendahnya tingkat akuntabilitas di Kecamatan yang disebabkan karena belum optimalnya penyelenggaraan administrasi perkantoran, maka disusun rencana kerja dan pendanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Uraian lebih rinci mengenai rencana kerja dan pendanaan di Kecamatan Sambungmacan dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Sragen

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan
Sambungmacan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan
Sambungmacan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Cata tan Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
				Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target									
					Kecamatan Sambungmacan								2,632,126,180					2.524.165.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								2,632,126,180					2.524.165.000,00
7	01				KECAMATAN								2,632,126,180					2.524.165.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													2.206.858.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,056,758,232					2.056.758.000,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Prosentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang Tercukupi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tercukupi	Kab. Sragen, Sambungmac an, Semua Kel/Desa	100 %	15 Orang/ bulan	100 %	2,056,758,232	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/ bulan	2.056.758.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								147,727,948					45.850.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

						Prosentase Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor tercukupi	Kab. Sragen, Sambungmac an, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.000.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Prosentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor tercukupi	Kab. Sragen, Sambungmac an, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	100 %	14,456,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	14.500.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Prosentase penyedian Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor tercukupi	Kab. Sragen, Sambungmac an, Semua Kel/Desa	100 %	12 Paket	100 %	16,350,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	16.350.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Prosentase Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	Kab. Sragen, Sambungmac an, Semua Kel/Desa	100 %	12 Paket	100 %	2,975,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Prosentase Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sragen, Sambungmac an, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	13,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lapora n	10.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								5,000,000					5.000.000,00

7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Prosentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sragen, Sambungmacan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								40,230,000					44.550.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Prosentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sragen, Sambungmacan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	26,505,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.550.000,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Prosentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sragen, Sambungmacan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.500.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Prosentase Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sragen, Sambungmacan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	100 %	6,225,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	6.500.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								53,716,948					54.700.000,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

						Prosentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sragen, Sambungmacan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Unit	100 %	44,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	44.200.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
						Prosentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sragen, Sambungmacan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	9,516,948	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.500.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								163,337,000				163.337.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												6.000.000,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
						Prosentase Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan yang Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Sragen, Sambungmacan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	6.000.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan												12.510.000,00

7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
						Prosentase Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan y h Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Sragen, Sambungmacan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	12,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12.510.000,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat													144.827.000,00
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
						Prosentase Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Sragen, Sambungmacan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	144,827,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	144.827.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								26,738,000					26.738.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum													26.738.000,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
						Persentase penanganan laporan kejadian	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan penanganan laporan kejadian	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sragen, Sambungmacan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	26,738,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	26.738.000,00

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								215,565,000					27.232.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah													27.232.000,00
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
						Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasi dengan baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang Pembinaan Kewilayah an	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sragen, Sambungmacan, Semua Kel/Desa	100 %	100 Orang	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	0,00
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													

						Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasi dengan baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Bulan Pembinaan Kewilayah an	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Sragen, Sambungmac an, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 Orang	0,00
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa												
						Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasi dengan baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Bulan Pembinaan Kewilayah an	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sragen, Sambungmac an, Semua Kel/Desa	100 %	140 Orang	100 %	9,838,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	140 Orang	19.505.000,00
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional												
						Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasi dengan baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Bulan Pembinaan Kewilayah an	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sragen, Sambungmac an, Semua Kel/Desa	100 %	70 Orang	100 %	5,727,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	70 Orang	7.727.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								22,000,000				100.000.000,00

7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi												100.000.000,00
					Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa												
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
						Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Yang Dibina	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sragen, Sambungmacan, Semua Kel/Desa	100 %	9 Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	90.000.000,00
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya												
						Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Prosentase Desa Yang Dibina	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sragen, Sambungmacan, Semua Kel/Desa	100 %	9 Laporan	100 %	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9 Laporan	10.000.000,00
TOTAL												2,632,126,180					2.524.165.000,00

BAB V

PENUTUP

Kecamatan Sambungmacan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Sragen berkewajiban untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sragen sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2021-2026. Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Sambungmacan telah menyusun Rencana Strategis Kecamatan Sambungmacan tahun 2021-2026 yang memuat tujuan dan sasaran strategis Kecamatan selama 5 (lima) Tahun. Selanjutnya, setiap tahun anggaran, Kecamatan Sambungmacan juga menyusun rencana kerja (Renja) sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Renja Kecamatan Sambungmacan tahun 2025 ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Sambungmacan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Sambungmacan 2021-2026. Dengan disusunnya Renja 2025 ini, Kecamatan Sambungmacan telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana, terkoordinasi dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2025, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Kerja Kecamatan Sambungmacan Tahun 2025 ini disusun dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan 2021-2026 tahun kedua dan diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Sragen tahun 2025. Renja 2025 ini menjadi dasar dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun 2025. Disamping itu, jika dalam perjalanan waktu terdapat prioritas kegiatan tertentu yang harus dilaksanakan, keterbatasan dana dan/atau adanya kebijakan Kepala Daerah maupun Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat, maka kegiatan yang sudah direncanakan dalam dokumen Renja 2025 ini dapat dilakukan penyesuaian (revisi) sesuai kebutuhan.

Sragen, 18 April 2024
CAMAT SAMBUNGMACAN

BUDI SANTOSO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19810301 199912 1 001